BUPATI WONOSOBO

SAMBUTAN BUPATI WONOSOBO
DALAM
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN WONOSOBO
PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2016
Selasa, 4 April 2017

Yang terhormat, Saudara Ketua, Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD;

Yang kami hormati, Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Bupati Wonosobo,

Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif Kabupaten Wonosobo;

Rekan-rekan pers, serta hadirin yang tidak dapat kami sebut satu persatu; Warga masyarakat Wonosobo pendengar siaran radio Pesona FM di manapun berada.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh; selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian,

Pertama-tama, marilah kita awali bersama pertemuan pada hari ini dengan memanjatkan do'a dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan, kita bisa mengemban tanggung jawab dan pengabdian kepada negara ini secara amanah, demi kemajuan bersama dan kesejahteraan masyarakat Wonosobo. Amin ya robbal 'alamin.

Sebelum menyampaikan pengantar tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2016 ini, kami memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap jajaran Dewan yang terhormat terkait beberapa hal strategis yang menjadi agenda kita.

Pertama, tentang pokok pikiran dan pandangan DPRD sebagai salah satu masukan dalam prioritas pembangunan tahun 2018, yang disampaikan dalam Musrenbang pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 lalu. Terkait dengan hal tersebut, kami sudah menugaskan kepada jajaran eksekutif untuk menyeleraskan hasil Musrenbang kecamatan, rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah serta gagasan dari DPRD serta berbagai usulan masyarakat untuk ditajamkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Semoga penyusunan RKPD Tahun 2018 ini menjadi awal bagi praktek penyusunan perencanaan Daerah yang terintegrasi, menggunakan sistem *e-planning* sekaligus nantinya menjadi dasar penganggaran atau *e-budgeting* sesuai kaidah reformasi birokrasi.

Selain itu, kami juga menyampaikan apresiasi atas pembahasan bersama oleh eksekutif dan legislatif terhadap beberapa rancangan peraturan daerah. Ada lima Raperda yang sudah disahkan dari delapan yang diajukan, yaitu Peraturan Derah tentang Ruang Terbuka Hijau, Penyelenggaraan Keolahragaan, Penyelenggaraan Usaha Hiburan, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penyelenggaraan Kearsipan. Tiga Raperda lagi yang masih harus diselaraskan, kami juga mengharapkan agar bisa segera dibahas.

Pembahasan Raperda pada awal tahun ini, seperti yang dilakukan tahun lalu, diharapkan mempercepat langkah kebijakan untuk mencapai sasaran strategis pembangunan sesuai amanat RPJMD Tahun 2016-2021.

Percepatan implementasi kebijakan itu juga selaras dengan berbagai kebijakan strategis lainnya yang sudah dilakukan sebelumnya, dimulai dari pembahasan sampai penetapan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Terkait hal tersebut kami menyampaikan apresiasi kepada DPRD yang telah bersama Eksekutif menetapkan Perda dimaksud sebagai langkah awal untuk melakukan penataan kelembagaan menuju birokrasi Wonosobo yang profesional, bersih dan melayani.

Penataan kelembagaan ini akan terus berproses sesuai logika organisasi dan manajemen pemerintahan daerah, termasuk nantinya dilakukan evaluasi dan revisi atau penyempurnaan apabila kelak dibutuhkan. Terkait dengan penataan kelembagaan dan pengisian personil perangkat daerah, dalam kesempatan ini, kami ingin menegaskan lagi bahwa mekanisme yang dipakai adalah sesuai ketentuan, termasuk Undang-Undang tentang Aparatur Sipil

Negara. Kami juga mempertimbangkan prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela, serta aspek senioritas dalam penentuan personil untuk menduduki jabatan organisasi perangkat daerah.

Rapat Paripurna Dewan, hadirin sekalian yang kami hormati, dan pendengar Radio Pesona FM yang berbahagia,

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pelaporan LKPJ 2016 yang kami sampaikan hari ini adalah bagian dari siklus rutin tahunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di mana Bupati menyampaikan keterangan tentang hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2016. Penyampaian LKPJ ini sudah diawali dengan surat tertanggal 21 Maret 2017 perihal LKPJ Bupati Wonosobo Tahun Anggaran 2016 sekaligus permohonan kepada DPRD Wonosobo untuk mengagendakan pembahasan LKPJ dimaksud.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan perundangan, kami akan menyampaikan secara singkat pengantar dokumen LKPJ ini untuk kemudian dibahas oleh Dewan bersama jajaran eksekutif sesuai penjadwalan yang sudah ditetapkan.

Dalam kerangka regulasi, LKPJ ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD yang merupakan aturan turunan dari Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.

Pasca Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, belum ada Peraturan Pemerintah yang secara teknis menjelaskan tentang format dan sistematika pelaporan kinerja Bupati sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Di sisi lain, karena nomenklatur urusan pemerintahan sudah berubah seiring penerapan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014, maka kami berinisiatif menuangkan pelaporan LKPJ tahun 2016 ini menggunakan nomenklatur urusan pemerintahan yang baru. Apabila pada LKPJ tahun lalu dituangkan dalam urusan wajib dan urusan pilihan, maka sesuai dengan substansi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LKPJ Tahun 2016 dijabarkan ke dalam 4 jenis atau tingkat urusan yaitu: urusan wajib pelayanan dasar sebanyak 6 urusan; urusan wajib non pelayanan dasar sebanyak 18 urusan; urusan pilihan sebanyak 7 urusan; ditambah 4 fungsi penunjang dan 3 fungsi lain urusan pemerintahan.

Urusan wajib pelayanan dasar meliputi urusan **pendidikan**; **kesehatan**; **pekerjaan umum dan penataan ruang**; **perumahan rakyat dan kawasan**

permukiman; **ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat**; dan urusan **sosial**. Enam urusan ini terkait langsung dengan kewajiban Negara untuk memberikan layanan dasar kepada warga pada aspek yang paling fundamental.

Selanjutnya, urusan wajib non pelayanan dasar mencakup urusan tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan, komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan urusan kearsipan.

Urusan pilihan meliputi urusan kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; energi dan sumberdaya mineral; perdagangan; perindustrian dan transmigrasi.

Di luar ketiga jenis urusan tersebut, masih ada fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan; keuangan; kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; serta penelitian dan pengembangan. Juga ada fungsi lain yaitu kerjasama daerah; pengawasan; hukum dan penataan peraturan perundang-undangan.

Komposisi urusan dan fungsi pemerintahan sesuai Undang undang Nomor 23 tahun 2014 itulah yang sekarang menjadi basis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kami berharap, adanya perubahan dan transisi nomenklatur urusan pemerintahan ini bisa cepat diadaptasi oleh unsur-unsur pemerintahan daerah baik eksekutif maupun legislatif.

Di samping adanya perubahan nomenklatur urusan pemerintahan, hal lain yang relevan untuk kami sampaikan sebagai pengantar LKPJ adalah tentang **transisi** antara dua periode kepemimpinan pemerintahan serta dokumen perencanaan RPJMD. Sebagaimana diketahui, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang menjadi dasar APBD tahun 2016 disusun menggunakan kaidah transisi dari RPJMD tahun 2010-2015, yang kerangka logisnya berbeda dengan RPJMD tahun 2016-2021. Namun, pada penyusunan KUA PPAS dan APBD Tahun 2016, sudah mulai dilakukan upaya akomodasi dan sinkronisasi, meskipun belum sepenuhnya bersandarkan pada kerangka logis RPJMD 2016-2021.

Masih terkait dengan hal tersebut, maka di dalam dokumen LKPJ ini, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2016 kami tuangkan

dalam format pelaporan menggunakan indikator RPJMD Tahun 2016-2021. Format ini kami maksudkan agar ada **keberlangsungan** dan **keberlanjutan** antara capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun sesudahnya, sekaligus menjadi awal patokan untuk mengevaluasi kinerja tahunan berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021.

Dari sisi nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga sama, bahwa OPD pelaksana urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2014 sudah mengalami perubahan seiring penerapan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Kami berharap pendekatan ini bisa dimaklumi dan disetujui oleh Dewan serta dipahami oleh segenap komponen masyarakat, sebagai perwujudan transisi dan keberlangsungan pemerintahan periode tahun 2010-2015 serta transisi antara OPD berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2014 dengan Perda Nomor 12 Tahun 2016.

Selanjutnya, mulai tahun depan pendekatan ini akan kami sempurnakan sehingga penyampaian LKPJ sekaligus menjadi mekanisme pemantauan kinerja daerah untuk pencapaian indikator RPJMD, sekaligus menjadi landasan bagi pemantauan kinerja akuntabilitas setiap OPD dalam konteks perjanjian kinerja dengan Bupati untuk pencapaian sasaran strategis daerah.

Hadirin sekalian dan pendengar Radio Pesona FM yang kami hormati,

Selanjutnya, untuk memudahkan pembahasan LKPJ dalam Rapat paripurna dan Komisi, kami ingin menjelaskan sekilas tentang dokumen LKPJ Tahun 2016 sebagai berikut:

Bagian Pertama adalah Buku LKPJ itu sendiri, yang memuat penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan nomenklatur urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Pada buku LKPJ ini, dipaparkan program, kegiatan dan realisasi APBD Tahun 2016 yang secara pembukuan dicatat berdasarkan data perhitungan APBD tanggal 2 Maret 2017, sehingga angka ini belum merupakan hasil audit BPK. Selanjutnya pemaparan pada setiap urusan menjelaskan pokok-pokok capaian tahun 2016 dari indikator kinerja RPJMD 2016-2021.

Selain penyelenggaraan desentralisasi, pada Buku LKPJ juga ada penjelasan tentang Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Wonosobo serta penyelenggaran Dana Desa.

Selanjutnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, yang di LKPJ

tahun sebelumnya dikenal dengan istilah tugas umum pemerintahan, pada LKPJ kali ini dituangkan sesuai dengan pengertian dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, meliputi :

a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Derah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Selanjutnya, **Bagian Kedua** dari dokumen LKPJ adalah lampiran berisi data atau tabel kegiatan APBD tahun 2016 yang sudah diolah dan disesuaikan dengan nomenklatur urusan pemerintahan sesuai Undang Undang Nomor 23 tahun 2014. Tabel ini merupakan penjelasan tambahan yang memberikan gambaran singkat tentang kegiatan APBD tahun 2016 berdasarkan OPD pelaksana, alokasi anggaran dan realisasinya, keterangan tentang metode pengadaan barang dan jasa bagi kegiatan yang ada komponen tersebut, serta *check-list* tentang substansi kegiatan.

Dokumen-dokumen itulah yang akan dipakai dalam pembahasan LKPJ pada Rapat Paripurna/Komisi DPRD, sesuai tahapan yang telah ditentukan oleh Badan Musyawarah DPRD. Tentu, pembahasan LKPJ ini lebih kepada substansi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan RPJMD dan

RKPD, **sedangkan pertanggungjawaban keuangan secara lebih rinci akan disampaikan pada forum Laporan Keuangan Daerah (LKD) setelah selesai audit dari BPK terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Wonosobo**.

Hadiri sekalian yang kami hormati,

Berdasarkan fokus isu tahunan pada periode pertama RPJMD Tahun 2016-2021, maka tema pembangunan tahun 2016 adalah "**Peningkatan Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah Yang Didukung Oleh Penyediaan Infrastruktur Yang Berkualitas Untuk Kesejahteraan Masyarakat**". Tema tersebut dijabarkan ke dalam fokus prioritas pembangunan pada enam isu sebagai berikut:

1. Penanganan darurat dan kebencanaan, yang difokuskan pada pembangunan pasar induk Wonosobo, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan penanggulangan bencana;
2. Infrastruktur dan Lingkungan, yang difokuskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, jembatan, listrik dan irigasi (JALI), air besih dan sanitasi serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
3. Penguatan ekonomi dan ketahanan pangan, yang difokuskan pada pengembangan investasi, peningkatan produksi, dan pemerataan distribusi melalui skema "***one village one product***" dan "***one district one product***", pertanian terpadu dan industri kecil menengah terintegrasi.
4. Pariwisata dan ekonomi kreatif, yang difokuskan pada peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata dan wisata kota, untuk mendorong jumlah kunjungan wisata dan menambah lama masa tinggal wisatawan di Wonosobo.
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik pada aspek khusus menyangkut SDM usia sekolah maupun usia kerja yang menyangkut peningkatan kualitas rohani dan jasmani untuk mendorong daya saing Wonosobo, seiring penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN.
6. Tata kelola pemerintahan, dengan fokus penguatan sistem penopang bagi reformasi birokrasi, termasuk data, sistem informasi, serta pemanfaatan *e-government* bagi layanan publik terutama di kecamatan.

Demikianlah enam poin prioritas 2016, yang kemudian diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui APBD tahun 2016.

Dari sisi kebijakan keuangan Daerah, resume penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2016 bisa disimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan dianggarkan sebesar Rp **1.723.957.430.560,00** dapat direalisasi sebesar Rp**1.575.601.733.680,00** atau 91,39% yang berarti kurang dari anggaran sebesar Rp**148.355.696.880,00;**
2. Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 setelah Perubahan sebesar Rp**1.945.936.335.686,00** dapat direalisasi Rp**1.619.140.120.460,00** atau 83,21% kurang dari anggaran sebesar Rp**326.796.215.226,00;**
3. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:
   a. Pembiayaan Penerimaan direncanakan sebesar Rp**238.009.495.126,00** dapat direalisasi sebesar Rp**238.104.871.956,00** atau 100,04%, lebih dari anggaran sebesar Rp**95.376.830,00** yang terdiri dari :
      - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) direncanakan Rp **238.009.495.126,00** dapat direalisasi sebesar **Rp238.041.000.846,00**.
      - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah direncanakan Rp0,00 dapat direalisasi sebesar Rp**63.871.010,00**.

   b. Pembiayaan Pengeluaran direncanakan sebesar Rp**16.030.590.000,00** dapat direalisasi sebesar Rp**16.030.590.000,00** atau 100,00 % berupa :
      - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan dianggarkan Rp**16.030.590.000,00** dapat direalisasi sebesar Rp**16.030.590.000,00** atau 100,00%

      Dengan demikian, terdapat Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp**178.535.895.176,00**

Rapat paripurna Dewan dan hadirin sekalian yang kami hormati,

Dari implementasi APBD Tahun 2016 tersebut, sebagian besar belanja dipakai untuk belanja pelayanan dasar maupun layanan wajib yang bersifat penting untuk mendukung visi RPJMD. Tentu saja, di samping beberapa keberhasilan serta beberapa prestasi yang sudah diraih pada beberapa sektor selama tahun 2016, masih banyak kendala dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan daya saing dan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Wonosobo.

Dalam bidang lingkungan hidup, sebagaimana misi ke-5 RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu "**melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah**", pengelolaan dampak lingkungan hidup memiliki makna strategis ke depan.

Awal tahun 2017 ini kita sudah dihadapkan dengan beberapa kejadian bencana alam, di samping juga masalah lain yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam pada aspek mineral batuan pasir batu.

Pengelolaan lingkungan hidup yang terkait dengan kehutanan, energi dan sumber daya mineral memang cukup pelik, mengingat kewenangan urusan tersebut sudah ditarik ke Provinsi, sementara dampak atau eksternalitas yang ditimbulkan terjadi di wilayah Kabupaten Wonosobo.

Dengan kondisi seperti itu, yang bisa dilakukan adalah melakukan mitigasi dan adaptasi serta mengetatkan aturan perizinan yang terkait dengan penataan ruang dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertambangan. Berdasarkan kajian singkat yang sudah dilakukan, maka Pertambangan Rakyat dinilai lebih tepat dan bermanfaat apabila dibandingkan dengan Usaha Pertambangan. Pemerintah Kabupaten Wonosobo akan berupaya semaksimal mungkin mengarahkan dan mendampingi masyarakat agar pemanfaatan kekayaan alam ini bisa sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan keberlanjutan lingkungan.

Mengenai angka kemiskinan Wonosobo yang masih berkisar pada angka 21,4%. Berbagai upaya sinkronisasi program terus dilakukan untuk mengurangi kemiskinan, pada program infrastruktur, ekonomi dan sosial budaya. Misalnya dalam sektor pendidikan, di mana dimensi atau ukuran kualitas pendidikan menjadi salah satu komponen angka kemiskinan. Salah satu yang sudah kami lakukan adalah membuka akses bagi anak putus sekolah di atas usia sekolah untuk mengikuti kejar paket. Juga, pemberian

beasiswa dan stimulan bagi siswa kurang mampu. Komitmen yang kami nyatakan bersama Wakil Bupati dalam *roadshow* pendidikan di 15 kecamatan adalah untuk terus mendorong peran berbagai pihak agar angka rata-rata lama sekolah meningkat.

Kami mengapresiasi upaya peningkatan partisipasi dan rata-rata lama sekolah, dimana sudah ada bantuan inisiasi dari dana transfer desa sesuai kewenangannya untuk memfasilitasi PAUD dan beasiswa bagi siswa kurang mampu.

Demikian juga, untuk menjangkau kelompok rentan, sudah ada program program sekolah ramah anak sebagai implementasi pendekatan yang inklusif dalam pendidikan. Kami juga terus mendorong program pelatihan bagi guru yang sekolahnya ada murid berkebutuhan khusus, dan diharapkan ini selaras dengan upaya membuka sekolah untuk murid penyandang disabilitas. Hal ini tidak hanya merupakan upaya penanggulangan kemiskinan, tetapi juga mencerminkan upaya pemenuhan hak dasar bagi masyarakat termasuk kelompok rentan.

Di bidang kesehatan, kami mengembangkan rumah singgah atau Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yaitu tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melakukan persalinan. RTK ini diperuntukkan terutama bagi ibu hamil beresiko tinggi yang jauh dari tempat pelayanan kesehatan. Hal ini dimaksudkan agar ibu hamil resiko tinggi dapat terus dipantau perkembangan kesehatannya sehingga aman dalam melakukan persalinan. Upaya ini dilakukan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Wonosobo.

Pada aspek lain, dalam konteks penanggulangan kemiskinan, kami belajar juga dari apa yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi, yang serius menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan untuk penanggulangan kemiskinan. Mengingat daerah kita juga dikaruniai potensi pariwisata, kami serius menjadikan ini sebagai sektor unggulan, dan dalam perencanaan program untuk tim penanggulangan kemiskinan, kebijakan ini akan menjadi salah satu prioritas.

Dimensi lainnya dari kemiskinan adalah tentang basis data yang digunakan. Mengingat Basis Data Terpadu (BDT) adalah kesepakatan nasional, maka upaya sejak tahun 2016 akan dilanjukan tahun 2017 dengan validasi basis data terpadu kemiskinan. Upaya ini diharapkan lebih mensinkronkan program penanganan kemiskinan berbasis data, yang selama ini sudah dipraktekkan pada program penanganan air bersih dan sanitasi, rumah tidak layak huni,

serta untuk penambahan kepesertaan penerima bantuan iuran BPJS kesehatan.

Kami menyadari bahwa polemik tentang basis data terpadu ini memang tidak mudah karena dinamika kependudukan serta hirarki antara pemerintah pusat yang menjadi koordinator data statistik dengan pemerintah daerah selaku pengguna data. Namun kami yakin bahwa sinkronisasi melalui validasi BDT 2015 adalah langkah yang harus dilakukan. Kami juga mohon partisipasi segenap komponen, termasuk para perangkat kecamatan, kelurahan dan desa agar ikut memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa basis data terpadu kemiskinan diperuntukkan hanya bagi masyarakat miskin. Perlu ketegasan sekaligus membangun sikap budaya dan mental yang positif, sehingga masyarakat yang tidak miskin malu untuk sengaja mengakses BDT agar bisa menerima bantuan.

Gambaran lain tentang sinkronisasi penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan infrastruktur wilayah terutama jalan, yang diprioritaskan untuk membuka aksesibilitas wilayah, dan memasukkan indikator daerah miskin di dalamnya. Kebijakan ini kami terapkan tidak hanya untuk kegiatan bersumber dana alokasi khusus atau DAK, bantuan keuangan Provinsi, namun juga untuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau serta pajak rokok, di mana ada komponen sebesar 50% untuk dialokasikan sesuai prioritas daerah. Untuk itu, kami sampaikan juga dalam kesempatan ini, sekaligus sebagai arahan bagi jajaran Pemkab Wonosobo, bahwa prinsip anggaran berbasis program prioritas harus menjadi pegangan, bukan lagi anggaran berbasis tugas dan fungsi. Ini semakin relevan karena keterbatasan kemampuan penganggaran kita, sehingga sinkronisasi program untuk prioritas daerah termasuk penanggulangan kemiskinan harus menjadi kriteria utama dalam penyusunan perencanaan.

Dewan yang kami hormati, hadirin dan pendengar Radio Pesona FM yang kami muliakan,

Relevan dengan hal tersebut, kami tetap melanjutkan capaian dari program BUMN Hadir untuk Negeri pada tahun 2016 untuk berbagai program kemitraan maupun CSR yang relevan dengan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Hasil positif tahun 2016 tetap kami lanjutkan, dan kami berterima kasih atas dukungan Pimpinan DPRD yang telah menyertai misi Pemkab ke berbagai kementerian untuk dukungan program terkait. Sampai hari ini sudah ada 2 MoU yang ditandangani dengan BUMN untuk pembangunan di bidang ekonomi kepariwisataan, yaitu

pengelolaan wisata Menjer dengan Indonesia Power dan pengembangan industri carica dengan PPI dan Sarinah. Ke depan, semoga program tetap berkesinambungan seiring jejaring kemitraan yang terus dibangun dengan berbagai BUMN.

Di luar program BUMN Hadir untuk Negeri, misi ke berbagai Kementerian ini juga telah membuahkan beberapa hasil positif. Secara khusus, kami akan melakukan percepatan untuk beberapa peluang program yang bisa diusulkan pendanaannya ke Pusat untuk sektor-sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemerintahan desa, serta pengembangan keolahragaan. Salah satu yang segera akan ditindaklanjuti Pusat adalah rencana pendirian SMK Watumalang, di mana Wonosobo pada tahun 2017 diharapkan segera membuka kelas baru dengan jurusan yang sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan masyarakat.

Selain itu kami juga sudah melakukan *sounding* awal ke Kementerian Kesehatan untuk wacana pengembangan RSUD Setjonegoro, dan mendapatkan tanggapan positif. Di bidang infrastruktur, kami terus berupaya agar ada peluang untuk rencana program *Ecodistrict* untuk tiga kota termasuk Wonosobo, yang saat ini sedang dikoordinasikan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan RI dengan Pemerintah Perancis. Apabila program *Ecodistrict* ini disetujui, maka Insya Allah kita bisa mewujudkan penataan berbagai obyek di Pusat Kota Wonosobo. Rencana *Ecodistrict* tersebut mencakup pengembangan Pasar Timur untuk bangunan hijau, gedung parkir multifungsi berkonsep hijau di kawasan eks Rita Pasaraya, rekayasa teknis ulang utilitas di Jl. A. Yani, penambahan ruang terbuka hijau di Tawangsari serta pengolahan sampah di TPA dengan konsep sampah untuk energi baru.

Proposal program *Ecodistrict* ini juga mendukung rencana penataan dan pemulihan infrastruktur perekonomian Wonosobo. Kami mohon maaf bahwa tahun 2016 pembangunan pasar belum bisa dilaksanakan. Namun kami menjamin bahwa seiring kelembagaan OPD sudah ditetapkan dan perangkat pendukungnya sudah siap, pembangunan pasar segera dilaksanakan. Di samping itu, kami tetap berusaha mencari skema lain pendanaan, termasuk melalui proposal Ecodistrict yang ditawarkan Pemerintah Pusat sehingga tidak terlalu memberatkan APBD.

Terkait dengan hal tersebut, relevan juga kami sampaikan kembali kebijakan tentang Rita Pasaraya. MoU tetap berlaku, di mana PT Rita harus berhenti beroperasi pada bulan Maret 2017. Namun, setelah mempertimbangkan berbagai faktor, terutama pertimbangan kemanusiaan kepada saudara-

saudara kita yang bekerja di Rita dan Plaza, dan setelah melalui kesepakatan melibatkan Manajemen Rita Pasaraya, PPIW, Persatuan Pedagang Plaza, Apindo, SPSI, disaksikan oleh pemerintah Daerah dan DPRD, akhirnya kami menyetujui pemberian kelonggaran tenggang waktu kepada Rita Pasaraya sampai 11 bulan ke depan untuk melakukan persiapan pindah ke lokasi yang baru.

Untuk itu, kami juga menekankan kepada semua pihak agar kebijakan terkait Rita benar-benar dikawal, ditaati dan dilaksanakan secara transparan.

Hadirin yang kami muliakan,

Berkat dukungan dan kemitraan dari DPRD, Forkopimda dan segenap komponen masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2016 juga menghasilkan beberapa prestasi yang diapresiasi oleh pemerintah atasan. Di bidang inovasi misalnya, salah satu inovator dan kreator dari Wonosobo yaitu Sdr. Yudik Prianto berhasil menorehkan prestasi pada tingkat provinsi maupun nasional. Untuk itu, kami mendorong agar budaya inovasi dan kreativitas terus berkembang, karena merupakan salah satu insentif untuk pengembangan potensi Wonosobo. Dalam perspektif ini, sesuai dengan karakteristik dan potensi Wonosobo, maka kami sedang merintis Sistem Inovasi Daerah atau SIDA agar bisa mewujudkan Wonosobo Kota Kreatif, yang akan menopang sektor unggulan pariwisata. Secara bertahap, kami memperbesar insentif dan dukungan bagi para inovator baik individu maupun lembaga, terutama pada domain sektor UKM dan industri kecil serta ekonomi kreatif yang bisa mendukung kepariwisataan dan pengembangan ekonomi daerah.

Relevan dengan hal ini, kita patut bersyukur bahwa tahun 2016 masih banyak penghargaan dan prestasi yang diraih baik pada tingkat provinsi, nasional maupun internasional.

Di bidang birokrasi, kita mendapatkan penghargaan Parahita Ekapraya untuk Kinerja Perencanaan Daerah, sehingga mendapatkan insentif tambahan kegiatan dari Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp 250.000.000. Di bidang olahraga, pendidikan atau kesiswaan beberapa prestasi diraih, misalnya untuk olimpiade sains nasional atas nama DEMA TATA LAKSANA, dan ANGGA KUSUMA, penelitian ilmiah remaja dan pelajar atas nama FAUZAN AKBAR AKHSAN dan DIVA DIVA RANIBDYA FAUZITA, serta jurnalistik tingkat nasional atas nama Tim Jurnalistik SMPN 2 Selomerto. Bahkan di tingkat internasional ada anak didik kita yang mendapatkan prestasi untuk olimpiade sains internasional atas nama SANDIKA KABITA dari SDN 1 Wonosobo dan

olahraga bulutangkis atas nama YODHI SATRIYO.

Masih tentang prestasi, nilai integritas ujian nasional Wonosobo sudah di atas angka provinsi dan nasional. Demikian juga nilai ujian nasional untuk SMP sudah di atas rata-rata Provinsi.

Prestasi pada tingkat Jawa Tengah lebih banyak lagi, pada sektor-sektor seperti kesehatan, kesejahteraan sosial dan pemerintahan desa.

Prestasi-prestasi itu penting untuk memberikan motivasi bagi kita sekaligus memberikan keyakinan bahwa Wonosobo masih memiliki daya saing. Untuk itu, penting bagi kita semua tetap menumbuhkan optimisme serta budaya inovatif, kreatif dan berdikari berdasarkan potensi dan kekuatan kita.

Kita perlu belajar dari banyaknya komunitas di Wonosobo yang sudah melakukan praktik pendekatan berbasis kekuatan, dan terbukti mereka bisa menggali potensi bahkan memberikan sumbangsih kepada pemerintah dan masyarakat melalui aksi mereka. Ke depan, semoga ini juga menjadi masukan bagi jajaran organisasi pemerintah daerah agar lebih giat bekerja, lebih kreatif dalam berusaha, serta lebih inovatif dalam membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk menggali keunggulan komparatif dan kompetitif Wonosobo.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati, dan hadirin sekalian yang kami muliakan,

Pada aspek yang lain, kami juga ingin menyampaikan lagi komitmen kita tentang upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah, sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, sekaligus untuk mendukung reformasi birokrasi di bidang tata kelola perencanaan dan penganggaran.

Apabila tahun 2016 kita belum sepenuhnya mengadopsi sistem terintegrasi, maka mulai tahun 2017 ini kami berkomitmen untuk menerapkan sistem terintegrasi bagi perencanaan kegiatan tahun selanjutnya. Hal ini tidak sekedar dilatarbelakangi oleh MoU yang sudah disepakati antara Pemkab Wonosobo dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Dalam Negeri, namun juga mencerminkan upaya untuk melakukan efisiensi dan pendekatan anggaran berbasis program prioritas.

Oleh karena itu, kami mohon komitmen segenap pihak termasuk DPRD, agar sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran benar-benar dipraktekkan. Langkah awal sudah dilakukan jajaran eksekutif yang terkait untuk mengintegrasikan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan atau SIPP

dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah atau SIMDA Keuangan. Dengan demikian, semua usulan pembangunan baik bersumber dari perencanaan politis, teknokratis, *top-down* dan *bottom-up* maupun usulan masyarakat, sejak awal sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan. Ini memang tantangan sekaligus agenda bersama bagi kita, agar tata kelola keuangan dan perencanaan daerah berpedoman pada kaidah akuntabilitas dan transparansi, sesuai siklus perencanaan dan penganggaran daerah.

Demikian pengantar singkat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016, dan selanjutnya dokumen LKPJ ini akan dibahas lebih mendalam oleh Dewan yang terhormat bersama OPD terkait sesuai jadwal yang telah disepakati. Kepada pimpinan OPD, sudah kami instruksikan untuk mengikuti proses ini secara seksama, sebagai bagian dari evaluasi kinerja daerah berdasarkan RPJMD sekaligus untuk mengukur kinerja OPD dalam mencapai indikator yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya juga kami sampaikan kepada seluruh komponen masyarakat, segenap Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, jajaran Forkopimda, perangkat Pemerintah Daerah dan segenap elemen pemangku kepentingan atas kerjasama dan dukungannya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2016. Kami mohon maaf atas beberapa target pembangunan yang belum tercapai, dan secara tulus, kami mengajak agar kemitraan ini bisa lebih dibangun dan dikuatkan lagi untuk mewujudkan Wonosobo yang Bersatu Untuk Maju, Mandiri, dan Sejahtera Untuk Semua.

Semoga Allah SWT, Tuhan yang Mahakuasa, senantiasa meridloi usaha kita. Amin ya rabbal ‘alamin.

Sekian dan terima kasih, Wabilahittaufiq wal hidayah, Wassalamu ’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO